

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Non Fisik Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Pembangunan BUMDes Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan pembahasan data dari hasil penelitian melalui wawancara dan didukung dari data yang telah sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini membahas bagaimana peranan yang dilakukan pemerintah desa Panggungharjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa non fisik di desa Panggungharjo.

Wawancara dilakukan kepada beberapa pegawai Pemerintah Desa Panggungharjo sebagai pelaku peranan, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan beberapa permasalahan yang akan diteliti, sehingga jawaban tersebut sebagai data dalam bab ini. Wawancara juga dilakukan kepada beberapa masyarakat sebagai pelaku partisipasi terhadap pembangunan di desa Panggungharjo.

1. Peran Pemerintah Desa

Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik di Desa Panggungharjo dijabarkan lebih rinci dengan menggunakan teori peranan yang

dikemukakan oleh Horoepetri, Arimbi dan Sentosa (2003), diantaranya peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi.

(a.) Peran Sebagai Alat Komunikasi

Pada tahapan ini peranan pemerintah desa didayagunakan sebagai instrument alat-alat untuk masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt. sebagai kepala desa Panggunharjo, beliau mengatakan : *“kami dari pemerintah desa telah menyediakan ruang public di setiap-setiap dusun yang ada di Desa Panggunharjo untuk memusyawahkan program-program pembangunan desa yang nantinya dari hasil musyawarah tersebut yang berisikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat kami seleksi lagi untuk kelanjutan program pembanguna desa tersebut”*.

Dalam hasil wawancara tersebut telah tergambar bahwa pemerintah desa menjadi alat komunikasi bagi warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Makna pemerintah sebagai alat komunikasi dikuatkan oleh penelitian Horoepetri, Arimbi dan Santosa (2003) menyatakan bahwa dengan adanya komunikasi dari warga dan pemerintah desa maka akan membentuk Persepsi yang dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang

untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

Peran komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan desa. Peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan balai desa, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Komunikasi pembangunan non fisik adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak pemerintah yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan non fisik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Komunikasi yang dibangun oleh aparat/pemerintah desa adalah komunikasi yang melahirkan konsep atau gagasan dalam pembangunan desa. Dengan adanya komunikasi antara

aparatus/pemerintah desa dan masyarakat maka akan menunjang proses implementasi dari pembangunan non fisik.

(b.)Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran ini didayagunakan sebagai suatu cara pemerintah desa untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Nurharyanta, S.H. sebagai Kasi Kesejahteraan desa Panggunharjo beliau mengatakan bahwa : *“kami selaku pemerintah desa melakukan mediasi untuk masalah atau konflik yang terjadi pada masyarakat. Setelah semua masalah atau konflik teridentifikasi kami memberikan jalan keluar untuk penyelesaian masalah atau konflik tersebut”*.

Dalam hasil penelitian di atas melalui wawancara dapat dilihat bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan salah satunya yaitu penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan proses identifikasi masalah kemudian pemerintah desa memberikan solusi dengan cara bertukar pikiran. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Menurut Amriani (2012) sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian

maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani,2012). Pemerintah desa memiliki kekuatan dalam melakukan penyelesaian sengketa.

Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*), Menurut Sarjono Sukamto (1984) bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

(c.) Peran Sebagai Terapi

Menurut tahapan ini, peranan yang dilakukan pemerintah desa adalah upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Ali Yahya, S.H. sebagai Kasi Pemerintahan Desa Panggungharjo, beliau mengatakan : *“pemerintah desa telah memberikan kepastian hukum dan insentif/dorongan kepada masyarakat berupa aktualisasi dan penghargaan. Tujuannya*

adalah supaya masyarakat tidak merasa takut untuk menyalurkan kemampuannya sesuai bidangnya masing-masing”.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menyatakan bahwa pemerintah sebagai terapi di wujudkan dengan upaya pemerintah mencegah masyarakat dalam hal rasa takut dengan cara memberikan bantuan kepastian hukum dan dorongan kepada masyarakat dengan aktualisasi dan penghargaan untuk masyarakat. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, ditanggulangi dengan suatu program. Terapi dengan cara memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif sehingga tersalurkan aktualisasi.

Pemerintah desa menjadi sebuah terapi untuk masyarakat agar merasa percaya diri untuk terus meningkatkan segala aspek seperti aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pembangunan non fisik dilakukan untuk masyarakat dengan adanya dukungan pemerintah desa agar dapat mencapai sesuai tujuan. Pemerintah desa sebagai alat terapi untuk memotivasi masyarakat agar meningkatkan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2. Partisipasi Masyarakat

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo saat pelaksanaan pembangunan desa, guna untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dengan menggunakan tingkat partisipasi masyarakat menurut teori Adi (2001:208). Bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ada 4 (empat) tingkat partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian ini terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sebagai berikut:

(a.) Tahap Assesment

Pada tahapan ini mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Oleh sebab itu, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada

implementasinya tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan didapati hasil pada analisis kebutuhan pada

1. Bidang ekonomi

Menurut bapak Seto seorang masyarakat desa Panggunharjo dalam bidang ekonomi dilakukan analisis kebutuhan seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara berikut :

“Ekonomi masyarakat desa Panggunharjo awalnya sangat memprihatinkan hampir seluruh warga hanya menjadi petani, maka pemerintah desa berinisiatif untuk mendata hasil bumi warga agar dapat menghasilkan nilai jual yang tinggi. Maka diadakanlah musyawarah, salah satu program tindak lanjut dari peningkatan ekonomi yaitu dengan mendirikan kampoeng mataraman yang berbasis penjualan makanan agar masyarakat dapat meningkat pada status ekonomi, kampoeng mataraman merupakan usaha yang bergerak di jasa wisata edukasi dan kuliner berbasis masyarakat agraris. Kampoeng Mataraman berlokasi di Selatan Jalan Ringroad Selatan desa Panggunharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta dengan produk dan layanan yang di tawarkan kepada konsumen berupa warung makan dengan menu khas tradisional jawa”

2. Bidang Pendidikan

Menurut bapak Seto seorang masyarakat desa Panggunharjo dalam bidang pendidikan menganalisis yang dilihat dari pengetahuan masyarakatnya.

“Masyarakat banyak yang tidak memiliki pendidikan tinggi, beberapa warga hanya tamatan SMP. Sehingga mempengaruhi pengetahuan masyarakat untuk mengembangkan ketrampilannya, biasanya pemerintah memberikan informasi dengan cara sosialisasi”

3. Bidang Kesehatan

Menurut bapak Seto seorang masyarakat desa Panggunharjo dalam bidang kesehatan juga dapat dilihat pada hasil wawancara berikut

“ saya sering prihatin sekali kepada warga yang kurang mampu dan penyakitnya tidak mudah disembuhkan karena pola makan yang sembarangan. Masyarakat dengan pola makan sembarangan disebabkan warga tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kesehatan, dikarenakan pendidikannya ada yang hanya SMP sehingga saya mengadakan musyawarah untuk berupaya mengajak masyarakat dan berkoordinasi dengan pusat pelayanan

kesehatan untuk mencari bantuan dalam bidang kesehatan dengan Kartu sehat.”

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dari informan digambarkan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan analisis kebutuhan untuk mencapai pembangunan. Dalam kasus yang dijabarkan informan, informan telah berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan para masyarakat yaitu permasalahan dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan agar pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah Desa telah melakukan assesmen atau analisis kebutuhan dalam bidang ekononi, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka pengembangan pembangunan non fisik agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Adi (2001) bahwa keterlibatan masyarakat dapat dilihat dalam tahap Assesment yaitu Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

Kondisi Desa dengan adanya limbah akan menjadi hambatan pembangunan non fisik seperti permasalahan yang timbul pada warga apabila limbah dibiarkan, akan menjadi

permasalahan dalam bidang kesehatan, yang kaitannya dengan pembangunan non fisik. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan non fisik bukan hanya perencanaan, namun masyarakat ikut dalam pengidentifikasian masalah agar dicapai sebuah pemecahan masalah bersama pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Liwan (2016) milik bahwa partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan pada tahap Assesment menggambarkan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah.

(b.) Tahap Alternative Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, pembangunan non fisik yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah desa melainkan dengan melakukan penggalan gagasan

yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua.

Hasil wawancara seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Abdul Malik Tokoh masyarakat dusun Krapyak Wetan: *“pada tahapan ini pemerintah desa menggali gagasan dari setiap dusun ke dusun yang berada dibawah pemerinthan Desa panggunharjo, pemerintah telah menyediakan ruang publik unuk mengadakan musyawarah dan di hadiri oleh kepala desa dan beberapa perangkat desa, pemerintah desa setiap 36 hari sekali berkunjung ke dusun-dusun untuk menanyakan perihal permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam program pembangunan”*.

Hasil wawancara yang dilakukan pada bapak Abdul Malik tokoh masyarakat dusun Krapyak Wetan dalam bidang ekonomi :

“ Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan program dalam bidang ekonomi yaitu melakukan diskusi dengan masyarakat yang memiliki minat untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah biasanya menawarkan beberapa program untuk menambah pengetahuan agar masyarakat dapat berinovasi setelahnya, Gagasan untuk meningkatkan perekonomian yang sebagian masyarakat mendapatkan gagasan

yang memiliki kaitan dengan hasil tani maka terbentuklah gagasan Kampoeng Mataraman”

Hasil wawancara tentang kegiatan untuk menggali gagasan dalam bidang pendidikan, diterangkan juga oleh bapak Abdul Malik tokoh masyarakat dusun Krapyak Wetan:

“Dalam bidang pendidikan, pemerintah melakukan pendataan terlebih dahulu pada warga masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi dan kurang mampu, kemudian dicari sebabnya mengapa tidak melanjutkan sekolah atau bahkan putus sekolah, kemudian mereka dikumpulkan kemudian mereka ditawarkan program beasiswa. Dengan begitu warga akan tertarik untuk terus melanjutkan pendidikannya. Namun ada juga warga yang tidak berminat dikarenakan usia yang sudah tidak muda lagi”

Hasil wawancara tentang kegiatan untuk menggali gagasan dalam bidang kesehatan diterangkan juga oleh bapak Abdul Malik tokoh masyarakat dusun Krapyak Wetan:

“Pada bidang kesehatan biasanya pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kader-kader kesehatan yang tersebar di setiap dusun yang ada di Desa Panggungharjo untuk mendata siapa saja yang memiliki atau menderita penyakit berat atau warga yang tidak mampu berobat. Dengan adanya kasus yang

timbul, Pemerintah menyediakan alternatif kegiatan yaitu dengan pembagian kartu sehat yang dilakuakn dengan sosialisasi untuk menjaring warga yang memang benar-benar membutuhkan”

Berdasarkan hasil wawancara digambarkan bahwa pemerintah memiliki andil dalam menggali gagasan dengan melibatkan masyarakat agar diketahui masalah yang dihadapi dan solusi yang harus diatas dengan memikirkan beberapa program yang muncul karena partisipasi masyarakat guna memecahkan masalah di dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan non fisik tidak serta merta diputuskan secara sepihak namun dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan dengan menggali gagasan yang mendalam semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung dengan baik dan didapatkan solusi pemecahan masalah dengan penggunaan alternatif program yang dirancang pemerintah desa untuk masyarakat.

Alternatif program dilaksanakan dengan kegiatan perencanaan. Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak.

Dalam pembangunan non fisik alternatif kegiatan dapat diwujudkan dengan merencanakan program yang berkaitan dengan peningkatan bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang peningkatan sosial ekonomi. Dalam bidang kesehatan pembangunan masyarakat direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan diadakannya penyuluhan dan pengobatan gratis untuk mendapatkan kesehatan, baik untuk bayi hingga lansia. Dalam pembangunan di bidang pendidikan dapat berupa dukungan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat seperti bantuan beasiswa untuk masyarakat. Dalam bidang peningkatan sosial ekonomi dapat diwujudkan perencanaan kegiatan seperti pelatihan mengolah sampah dalam rangka memberikan bekal masyarakat agar menambah pendapatan ekonomi dari pengelolaan sampah.

(c.) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahapan ini dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis turun langsung ke tempat pengerjaan pembangunan non fisik di desa Panggungharjo, yang penulis lihat pembangunan non fisik tersebut sedang berjalan adalah pembangunan kampoeng mataraman.

Kampoeng mataraman tersebut adalah bagian dari BUMDes yang berbasis makanan.

Kegiatan pada bidang ekonomi Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Panggungharjo, beliau mengatakan : *“Pada bidang ekonomi saat ini pengerjaan pembangunan yang sedang berjalan adalah kampoeng mataraman, semua pekerjanya adalah masyarakat Desa Panggungharjo ada beberapa yang memang memberikan partisipasi tenaga ataupun sumbangan uang, namu masyarakat disini cukup partisipatif dalam hal pembangunan,*

Kegiatan pada bidang pendidikan dan kesehatan dikatakan oleh Kepala Desa Panggungharjo, beliau mengatakan : *Pada bidang pendidikan yaitu pemberian beasiswa setiap semester, dan pada bidang kesehatan program pemerintah Desa yaitu memberikan kartu sehat untuk mengurangi beban biaya kesehatan warga masyarakat”.*

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dapat dilihat keterlaksanaan program pembangunan non fisik diwujudkan pada peningkatan bidang sosial ekonomi yang terwujud dalam bentuk *kampoeng mataraman*. Tahapan ini menilai pembangunan non fisik dalam bidang peningkatan sosial ekonomi yaitu area kampung untuk menyelenggarakan makanan agar masyarakat dapat meningkat pada status ekonomi dengan adanya area penjualan

makanan dengan berbagai fasilitas tersebut. Bidang pendidikan pemerintah Desa memberikan beasiswa bagi warga berprestasi namun lemah ekonomi, dan Bidang kesehatan memberikan kartu sehat guna membantu meringankan warga yang lemah ekonomi”

Pelaksanaan implementasi program merupakan salah satu usaha pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan siklus yang terus menerus., dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada diharapkan masyarakat dapat diberdayakan. Untuk itu pemerintah melalui instansi terkait, memfasilitasi proses-proses pemberdayaan melalui berbagai program kemasyarakatan, pembinaan dan pemberian bantuan untuk menggairahkan pembangunan desa serta pemberian pelatihan keterampilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini dikuatkan dalam jurnal milik Harli (2013) bahwa Proses implementasi program kebijakan adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi maupun operasional. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang mutlak, yaitu (a) adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan. (b) target group, yaitu sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran yang diharapkan akan menerima program tersebut, perubahan atau peningkatan. (c) unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengolahan

maupun pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harli (2013) yang menyatakan bahwa proses implementasi kegiatan dapat dikatakan berhasil karena telah memenuhi syarat proses implementasi. Syarat yang telah dipenuhi yaitu adanya program dari pemerintah untuk pembangunan non fisik seperti program pengelolaan sampah, adanya sasaran kelompok masyarakat yang akan menerima program tersebut dan unsur pelaksanaan dalam program hingga pengawasan telah terpenuhi agar program pengelolaan sampah dapat berjalan lancar sesuai tujuan.

(d.) Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Pada tahapan berikut ini dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Masyarakat ikut mengawasi dari laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan.

Di desa Panggungharjo peran masyarakat dalam tahap evaluasi ini terlihat begitu antusias, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yakni informan masyarakat salah satunya bapak Andi Kurniawan seorang masyarakat desa Panggungharjo mengatakan: *“saya sebagai masyarakat sangat antusias untuk melihat hasil akhir dari suatu program*

pembangunan desa, karena pada akhirnya pembangunan tersebut akan membawa dampak yang sangat bagus bagi saya dan masyarakat lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas belum nampak adanya kegiatan evaluasi pada pembangunan non fisik di Desa Panggungharjo. Evaluasi program dapat dilakukan setelah dilakukan monitoring. Menurut PP 39/2006, disebutkan bahwa Monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk Mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari Monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Hasil penelitian wawancara pada tahap evaluasi belum tergambar adanya monitoring yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam hasil penelitian juga belum tergambar adanya evaluasi program yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

3. Pembangunan Desa

a. Pembangunan dibidang perekonomian

Ekonomi merupakan salah satu hal penting yang mendukung peningkatan taraf hidup manusia. Ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan sama dengan pendidikan. Tingkat ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi setiap pembangunan yang ada tidak terlepas pembangunan di desa. Ketika ekonomi di desa mengalami peningkatan maka akan berdampak kepada pembangunan desa yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Desa Panggungharjo saat ini sedang berupaya untuk dapat meningkatkan pembangunan desa melalui bidang ekonomi. Pembangunan dibidang ekonomi yang saat ini sedang dilakukan adalah pengembangan BUMDes. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt. sebagai berikut: *“saat ini pemerintah desa panggungharjo dalam pembangunan bidang ekonomi terfokus pada pengembangan BUMDes, terutama dalam pengolahan sampah. Dimana sampah tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik, sumber energi dalam bentuk biomasa dan biogas, kerajinan tangan dan lain-lain”*.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara diketahui pembangunan desa dibidang ekonomi dengan adanya pengembangan BUMDes, bentuk pembangunan non fisik ini diwujudkan dalam

pengelolaan sampah yang dulunya menjadi masalah bagi desa Panggunharjo. Desa ini memanfaatkan material sampah guna mendukung pembangunan desa non fisik dalam rangka meningkatkan kemajuan sosial ekonomi. Pembangunan masyarakat memberi manfaat untuk kemajuan sosial ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai teori Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Sedangkan menurut sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan masyarakat identik dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan pendekatan saja namun memecahkan masalah dibidangnya masing-masing. Dalam hal ini pembanguan dalam bidang ekonomi dengan cara adanya pengelolaan sampah yang diawali dengan pemberian model bergulir, pemerintah Desa juga tetap perlu menjadi penguatan kelembagan ekonomi masyarakat, penguatan SDM, penguatan sarana prasana. Pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi harus dilakukan secara konsisten dan tidak

mendiskrimiasi ekonomi lainnya dengan cara pendekatan kelompok. Pembangunan dalam bidang ekonomi harus selalu didukung oleh masyarakat dan juga pemerintah Desa.

b. Pembangunan dibidang pendidikan

Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Pendidikan adalah cara untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia sehingga menunjang pembangunan, kemudian pembangunan adalah cara yang digunakan manusia untuk menunjang pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan dibidang kesehatan merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menunjang pembangunan desa dengan peningkatan kualitas masyarakat.

Pembangunan desa dibidang pendidikan sudah cukup baik dilaksanakan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Panggungharjo, Muhammad Ali Yahya, S.H. dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut: *“pemerintah desa Panggungharjo dalam pembangunan di bidang pendidikan telah memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu, dimana pembiayaannya 50% dibiayai oleh desa dan sisanya 50% lagi dibiayai oleh penyedia layanan asuransi, diharapkan dengan adanya bantuan ini, anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat mengenyam pendidikan dengan layak dan nantinya anak-anak*

tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik terutama dalam pembangunan desa”.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa mendukung dalam pembangunan masyarakat dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah cara untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia sehingga menunjang pembangunan. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan akan mampu membangun masyarakat secara terorganisir. Dengan adanya pendidikan akan mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam era globalisasi pendidikan merupakan kekuatan utama dalam mengimbangi laju perkembangan berbagai bidang.

Hal tersebut diperkuat dalam pembukaan UUD 45 yang tertulis mencerdaskan kehidupan berbangsa. Di Indonesia, metode pembangunannya biasa dikenal pembangunan nasional. Pada Pembangunan Nasional, terdapat lima aspek komponen yang menjadi tujuan akhir, yaitu kemakmuran di bidang material, (2), kesejahteraan fisik dan rohani, kebahagiaan masyarakat, bangsa yang berkeadilan sosial dan kesejahteraan mental, yaitu kaitannya dengan peningkatan pendidikan melalui penambahan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dalam hal ini menentukan arah pembangunan nasional. Jika tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih rendah, maka hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan nasional.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa dengan masyarakat mampu mendukung pembangunan dibidang pendidikan dengan berjalannya program beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu, agar seluruh masyarakat dapat menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

c. Pembangunan dibidang kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Semakin rendahnya tingkat kematian akibat penyakit, maka semakin sejahtera masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang cukup kompleks di Indonesia.

Pembangunan non fisik desa dibidang kesehatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung pembangunan desa. Pembangunan dibidang kesehatan di Desa Panggungharjo dikatakan sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Panggungharjo, Nurharyanta, S.H. mengatakan sebagai berikut: *“pemerintah Desa Panggungharjo melalui Bapel JPS Panggungharjo bekerjasama dengan Rumah Sehat BAZNAS UII Metro TV memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan Kartu Sehat. Kartu Sehat dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan diri di Bapel JPS Panggungharjo*

atau lewat kader kesehatan pedukuhan dengan melampirkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga. Cakupan layanan Kartu Sehat ini meliputi poli umum, poli gigi, pemeriksaan laborat, penanganan kegawatdaruratan, pelayanan KB dan cek kehamilan, serta pelayanan obat dan bahan farmasi lainnya”.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa memberikan dukungan bagi pembangunan non fisik dalam bidang kesehatan seperti memberikan Kartu sehat agar masyarakat memiliki akses kesehatan yang mudah. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Desa kepada Rumah Sehat BAZNAS UII merupakan salah satu upaya pemerintah Desa dalam rangka menyukseskan pembangunan non fisik.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian milik Rangga (2011) bahwa merealisasikan pembangunan nonfisik perlu adanya peran pemerintah lewat dinas-dinas terkait dalam memberikan bimbingan, stimulasi, dan persuasi kepada masyarakat agar pembangunan nonfisik dapat berjalan dengan baik. Hal ini merupakan salah satu langkah agar kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nonfisik dapat berjalan dengan baik, sehingga kesejahteraan serta kebersamaan masyarakat untuk menyukseskan pembangunan, baik pembangunan nonfisik dapat tercapai serta dapat menyelaraskan dengan pembangunan fisik di daerah tersebut.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Non Fisik Desa Panggunharjo

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan juga dapat di katakan baik apabila pelaksanaan yang dihasilkan sesuai dengan sasaran atau bahkan melebihi sasaran, sebaliknya suatu peranan dapat di katakan buruk apabila pelaksanaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan sasaran atau jauh dari sasaran.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemerintah desa Panggunharjo, yaitu dari segi faktor kepemimpinan dan komunikasi.

1. Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin di dalam memimpin warganya maupun di dalam mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan mempengaruhi intensitas

partisipasi masyarakat yang akan diberikan terhadap pembangunan di desanya. Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena baik buruknya partisipasi masyarakat bergantung pada pimpinannya. Pimpinan merupakan penggerak orang lain yang akan memimpin, membimbing, dan mempengaruhi agar tercapai hasil yang diharapkan.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Panggungharjo adalah gaya kepemimpinan demokratis karena pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif, hal ini dimaksudkan agar terwujud kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini indikator gaya kepemimpinan Kepala Desa yaitu memiliki ketrampilan dalam memotivasi masyarakat agar bersama-sama melakukan perubahan. Bukti bahwa Kepala Desa turut dalam memotivasi masyarakat yaitu adanya berbagai pembangunan non fisik yang dapat meningkatkan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Selain itu Kepala Desa Panggungharjo memiliki tegas dalam mengambil keputusan serta berbuat adil didalam pengambilan keputusan ketika terjadi sengketa masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aisia (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala

desa sangat berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu gaya demokratis. Gaya kepemimpinan ini cenderung lebih efektif dalam membangun partisipasi masyarakat untuk membangun desa.

2. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Panggunharjo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya, sudah sangat baik terbukti dengan partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi dalam pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Panggunharjo selain dilakukan dalam sebuah rapat pertemuan dan musyawarah (rembug desa) juga dilakukan pada saat Kepala Desa Panggunharjo melakukan kunjungan ke dusun-dusun yang berada dibawah naungan pemerintah Desa Panggunharjo.

Sehingga diharapkan dengan terjalannya komunikasi yang baik, maka Kepala Desa Panggunharjo akan lebih mengerti kepentingan

dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kaitannya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Panggunharjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Heriyanti (2013) bahwa Program komunikasi yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan nelayan dan keluarganya dalam mengelola hasil tangkapan , memperbaiki sikap yang merusak lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam, peningkatan kemampuan manajemen usaha penangkapan dan diversifikasi usaha yang disertai penguatan ekonomi keluarga melalui usaha produktif, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan mengedepankan prinsip sustainability dan kesejahteraan masyarakat, membangun jejaring dengan mitra usaha guna memperbesar armada dan menggunakan alat tangkap yang lebih efektif dan tidak merusak lingkungan.

Peran penting komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah menjembatani kesenjangan yang terjadi antara kondisi masyarakat saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang partisipatif, dialogis dan memotivasi.